

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kalimantan Tengah Per 31 Agustus 2021



Harian Kalteng Pos

PALANGKA RAYA - Tren positif Pendapatan Negara diharapkan tetap berlanjut, sehingga kerja keras APBN dalam penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi dari dampak pandemi tetap terjaga.

Setelah sempat mengalami penurunan pada triwulan I, angka pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah (Kalteng) mendapat pertumbuhan positif di angka 5,66 persen di triwulan II. Pertumbuhan ekonomi di Kalteng tidak lepas dari upaya keras APBN dalam memulihkan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2021 berjalan.

Dalam rilisnya, Kamis sore (23/09/2021), Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb Kalteng bersinergi dengan OJK Kalteng, Perwakilan BI di Kalteng, dan Satgas Covid Kalteng yang dikemas dalam acara media update menerangkan APBN berhasil menahan kontraksi ekonomilebih dalam akibat tekanan pandemi Covid 19. Tanpa intervensi APBN dan program Pemulihan Ekonomis Nasional (PEN), kontraksi ekonomi akan lebih dalam.

Realiasi belanja K/L Provinsi Kalteng per 31 Agustus 2021 mencapai 4,73 triliun dari pagu 9,58 triliun atau 49,37% dengan realisasi belanja yang belum optimal adalah Belanja Modal 1,46 triliun atau 33,95 persen dan Belanja Bantuan Sosial 7,12 miliar atau 44,10 persen.

Kepala Kanwil DJPb Kalteng, Hari Utomo, mengatakan faktor yang berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalteng berasal dari belanja pemerintah dengan realisasi belanja negara baik dalam bentuk belanja pegawai, belanja barang, program bansos maupun belanja modal.

“Pemerintah melalui instrumen APBN terus bekerja keras melindungi masyarakat dan menjaga keberlanjutan proses pemulihan ekonomi,” katanya.

Untuk terus bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di Kalteng, lanjutnya, DJPb terus meminta seluruh satuan kerja agar bisa menyerap anggaran, terutama pada penyaluran DAK fisik dan dana desa.

Per 31 Agustus 2021, sejumlah daerah menjadi catatan penting dalam kurangnya realisasi penyaluran DAK Fisik, yakni Kotawaringin Timur dengan hanya 17,95 miliar atau 14,54 persen dan Palangka Raya dengan 15,7 miliar atau baru 24,02 persen.

“Guna mempercepat kinerja dan penyerapan anggaran sesuai *good government*, maka kita selalu bersinergi dengan sekda setempat. Tentu pengelolaan dan penyerapan harus disesuaikan dengan *good government*,” tegasnya.

Sedangkan untuk penyaluran dana desa per 31 Agustus 2021 di Kalteng telah mencapai angka Rp765,18 miliar dari pagu senilai Rp1,4 triliun atau 53,63 persen yang telah tersalurkan pada 1.433 desa.

“Sebagai upaya memulihkan ekonomi masyarakat, program PC PEN di Kalteng juga terus berjalan. Sampai dengan 17 September sudah terealisasi Rp1,811 triliun. Terdiri dari sektor kesehatan Rp249,5 miliar, dukungan UMKM dan korporasi Rp110,57 miliar, program prioritas Rp537,81 miliar dan perlindungan sosial Rp873,08 miliar,” jelasnya.

Hari Utomo menambahkan, APBN senantiasa hadir dalam penanganan Covid 19 dan pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi terus berlanjut, optimisme masih tinggi meski faktor risiko tetap perlu diwaspadai.

Sinergi antar lembaga pemerintah, termasuk pemerintah daerah perlu terus dijalankan untuk memastikan, setiap program prioritas pemerintah dapat terlaksana dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Peran aktif masyarakat juga terus didorong agar Indonesia segera keluar dari tekanan akibat pandemi Covid-19.

“Peran penting APBN terus diperkuat dalam upaya pemulihan ekonomi saat pandemi. Peran aktif masyarakat juga diperlukan dalam penerapan 5M dan 3T, serta keikutsertaan vaksinasi,” tutupnya.

Sumber berita:

1. Harian Kalteng Pos, Kinerja APBN Kalteng Per 31 Agustus 2021, Selasa, 28 September 2021.
2. <https://www.borneonews.co.id/>, Ekonomi Kalteng Tumbuh 5,66 Persen Triwulan II 2021, Senin, 27 September 2021.

Catatan:

Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.07/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, menyatakan bahwa:

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan belanja prioritas lainnya.
- (2) Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari DAU atau DBH yang digunakan untuk:
 - a. dukungan pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang dapat berupa:
 1. dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 2. pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 3. distribusi, pengamanan, penyediaan tempat penyimpanan vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) ke fasilitas kesehatan; dan
 4. insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
 - b. mendukung kelurahan dalam pelaksanaan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) melalui penyediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelurahan dan dapat digunakan untuk kegiatan pos komando tingkat kelurahan;
 - c. insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
 - d. belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.